

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu keberlanjutan kini menjadi perhatian utama dalam perkembangan ekonomi global, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan kesejahteraan sosial. Perusahaan tidak lagi hanya dituntut mencapai keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan (Priyo and Haryanto 2022). Dalam konteks tersebut, laporan keberlanjutan berperan sebagai instrumen strategis untuk menyampaikan informasi yang transparan dan terukur kepada pemangku kepentingan, sebagai wujud akuntabilitas perusahaan atas tanggung jawab sosial dan lingkungannya. (Priyo and Haryanto 2022).

Komitmen pembangunan berkelanjutan awalnya diwujudkan melalui *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000 dan dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2015 yang mencakup 17 tujuan global dengan tiga dimensi utama pembangunan berkelanjutan sebagaimana dijelaskan dalam konsep Triple Bottom Line John Elkington, yakni sosial (*people*), lingkungan (*planet*), dan ekonomi (*profit*) (Miller 2022). Dalam

praktiknya, perusahaan berkontribusi melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tidak hanya dipandang sebagai kewajiban sosial, tetapi juga strategi bisnis untuk memperkuat reputasi, mengurangi risiko hukum maupun lingkungan, serta mendukung kinerja keuangan jangka panjang (Miller 2022). Lebih jauh, pengungkapan CSR berperan penting dalam membentuk pemahaman positif bagi *stakeholder*, karena mencerminkan akuntabilitas perusahaan terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari aktivitas bisnis yang dijalankannya (Sulistyo 2021).

Global Reporting Initiative (GRI) telah menjadi standar pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan secara global oleh berbagai jenis organisasi, mulai dari perusahaan swasta, lembaga publik, hingga organisasi non-profit (Raihan Gutama and others 2024). Standar ini memberikan panduan yang sistematis dan terukur untuk mengungkapkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari aktivitas bisnis secara konsisten (Mutihah 2023). Dalam *GRI Standards 2021*, terdapat dua komponen utama, yaitu Kinerja Disclosures yang menitikberatkan pada pengungkapan profil organisasi, tata kelola, praktik etika, serta keterlibatan pemangku kepentingan, dan kinerja ekonomi yang menekankan pada pengungkapan kontribusi ekonomi perusahaan, termasuk penciptaan nilai ekonomi dan distribusi manfaat kepada berbagai pihak (Apriwandi and Fahria 2022). Kedua komponen ini menjadi

dasar penting dalam penyusunan laporan keberlanjutan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki nilai evaluatif yang kuat bagi para pemangku kepentingan (Apriwandi and Fahria 2022).

Praktik penyusunan *Sustainability Report* (SR) di sektor perbankan Indonesia dari tahun ke tahun memang semakin banyak dilakukan. Namun, kualitas pengungkapan yang dihasilkan ternyata masih jauh dari sempurna. Pada aspek *Kinerja Disclosures*, (GRI 2) kebanyakan bank umum hanya sebatas memaparkan profil perusahaan dan struktur tata kelola, sementara informasi yang lebih penting seperti keterlibatan pemangku kepentingan atau transparansi etika bisnis belum banyak disentuh (Chairani and Siregar 2021). Kondisi ini jelas menimbulkan tanda tanya, sebab bank umum memiliki modal dan sumber daya besar, yang seharusnya mampu menyajikan laporan keberlanjutan dengan kualitas tinggi (Chairani and Siregar 2021).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar GRI di Indonesia masih belum merata. menyebutkan bahwa sekitar 80% perusahaan di Indonesia, termasuk perbankan, sudah mengadopsi GRI. Namun, kenyataannya banyak indikator yang belum terungkap secara mendalam. Bahkan di sektor perbankan syariah, tingkat pengungkapan juga masih rendah. (Syahputri and others 2019) mencatat rata-rata pengungkapan CSR berbasis Indeks GRI baru

mencapai 54,40%, sementara (Al Hamzah and Apriliasari 2024) menemukan bahwa pengungkapan topik sosial spesifik hanya sekitar 57%. Temuan serupa terlihat pada konteks BPRS, di mana pengungkapan keberlanjutan cenderung bersifat parsial dan dominan naratif, dengan fokus pada indikator tertentu serta keterbatasan dalam pengungkapan tata kelola dan dampak ekonomi yang terukur. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik bank syariah berskala besar maupun BPRS masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip pengungkapan GRI secara komprehensif, terutama pada lembaga dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas pelaporan (de Villiers, La Torre et al. 2022).

Pada aspek Kinerja Ekonomi (GRI 200), masalah yang sama juga terlihat. Bank umum cenderung hanya menonjolkan indikator finansial seperti laba, aset, atau pertumbuhan, tetapi distribusi nilai ekonomi bagi masyarakat, UMKM, dan komunitas jarang diuraikan secara menyeluruh (Gürtürk and others 2020). Sementara, GRI 200 menekankan pentingnya pemerataan distribusi nilai ekonomi. Berbeda dengan bank umum, BPRS memang lahir dengan orientasi pada pemberdayaan ekonomi umat, sehingga berpotensi memberikan dampak yang lebih inklusif. Akan tetapi, hal ini tetap harus dibuktikan, apakah pengungkapan dalam laporan PT BPRS Arsa Sejahtera benar-benar mencerminkan prinsip keberlanjutan tersebut (Al Hamzah and Apriliasari 2024).

Masalah kelengkapan pengungkapan juga muncul pada indikator Kinerja Ekonomi (GRI 200). Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa bank umum lebih fokus pada GRI 201 sedangkan indikator lain seperti dampak ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan, anti-korupsi, hingga transparansi pajak masih kurang diperhatikan (Mutihah 2023). Hal ini mencerminkan lemahnya komitmen perbankan untuk melaksanakan pelaporan keberlanjutan secara menyeluruh. Karena itu, penting untuk menguji sejauh mana BPRS mampu menghadirkan pengungkapan indikator ekonomi secara lebih transparan dan akuntabel (Ananda, Pradesa et al. 2023).

Di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan seluruh bank termasuk BPRS untuk membuat laporan keberlanjutan yang merujuk pada aturan yang dikeluarkan oleh POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Laporan ini tidak hanya menampilkan kinerja ekonomi (GRI 200), tetapi juga aspek sosial seperti kesetaraan layanan, perlindungan data pribadi, dan aspek lingkungan terkait pengelolaan sumber daya (Bais, Nassimbeni et al. 2024). Hal ini membuka ruang analisis lebih dalam, apakah laporan tersebut sudah mencerminkan praktik keberlanjutan yang kredibel, atau justru hanya sebatas formalitas (Ananda, Pradesa et al. 2023).

Fenomena tersebut bisa dijelaskan dengan teori legitimasi. Menurut (Dowling and Pfeffer 1975) legitimasi organisasi merupakan kondisi ketika sistem nilai yang dianut oleh suatu organisasi dipersepsikan selaras dengan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat tempat organisasi tersebut beroperasi dan dikembangkan oleh penelitian (Suchman 1995, Pertiwi, Putri et al. 2024) sebuah organisasi hanya bisa bertahan jika aktivitasnya sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Laporan keberlanjutan menjadi alat strategis untuk memperoleh legitimasi, karena menunjukkan keselarasan perusahaan dengan ekspektasi sosial. Tetapi, legitimasi akan rapuh bila laporan hanya dibuat untuk kepatuhan formal. Hal ini sangat relevan bagi BPRS, yang beroperasi dekat dengan masyarakat lokal dan sangat bergantung pada kepercayaan publik sebagai modal sosial utama.

Teori *stakeholder* juga memperkuat pentingnya fenomena ini. (Zain 2021) menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, melainkan juga kepada *stakeholder* lain seperti karyawan, nasabah, regulator, hingga masyarakat. Standar GRI membantu perusahaan merespons kebutuhan stakeholder secara lebih transparan. (Sururi and Gantowati 2023) bahkan menegaskan bahwa tanpa keterbukaan informasi, hubungan dengan *stakeholder* akan melemah, karena tidak ada dasar objektif untuk menilai kinerja perusahaan. Dalam

konteks BPRS ini, penerapan GRI 2 dan GRI 200 bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga cara menjaga legitimasi sosial sekaligus memperkuat kepercayaan *stakeholder* (Sururi and Gantjowati 2023).

Implementasi laporan keberlanjutan di perbankan masih menemui kendala teknis. Walaupun OJK sudah menerbitkan aturan seperti POJK No. 51/POJK.03/2017, faktanya banyak bank masih terkendala dengan ketersediaan data, kualitas SDM, hingga lemahnya integrasi strategi keberlanjutan dalam operasional (Bais, Nassimbeni et al. 2024). Hambatan ini tentu lebih berat dirasakan BPRS yang memiliki modal dan infrastruktur lebih terbatas (Pertiwi, Putri et al. 2024) . Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana BPRS mampu memenuhi standar GRI 2 dan GRI 200, sekaligus mempertahankan legitimasi sosial dan memenuhi ekspektasi *stakeholder*.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan menjadi kebutuhan mendesak bagi BPRS. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai perantara penghimpun dan penyalur dana sesuai prinsip syariah, tetapi juga dituntut untuk memastikan praktik bisnisnya sejalan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial (Gürtürk and others 2020). Dalam konteks ini, analisis terhadap pengungkapan Kinerja Disclosure (GRI 2) dapat menunjukkan sejauh mana BPRS mampu

membangun tata kelola yang transparan, etis, dan sesuai syariah. Sementara itu, pengungkapan kinerja ekonomi (GRI 200) menjadi penting untuk mengevaluasi kontribusi nyata BPRS dalam menciptakan dan mendistribusikan nilai ekonomi kepada nasabah, UMKM, dan komunitas lokal yang menjadi basis utama keberadaannya. Kedua aspek ini dipandang paling relevan untuk mencerminkan fungsi inti dan tanggung jawab sosial-ekonomi BPRS (Gürtürk and others 2020).

Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada bank umum dan bank syariah berskala besar. Kajian mengenai laporan keberlanjutan perbankan di Indonesia menunjukkan bahwa pengungkapan GRI 2 pada bank umum umumnya masih terbatas pada profil organisasi dan struktur tata kelola, sementara isu penting seperti keterlibatan pemangku kepentingan maupun transparansi etika bisnis belum banyak diuraikan (Chaerani and others 2024). Oleh karena itu, pada aspek kinerja ekonomi, bank umum cenderung menitikberatkan pada kinerja finansial seperti laba dan aset, tetapi jarang menjelaskan distribusi nilai ekonomi kepada masyarakat secara komprehensif (Gürtürk and others 2020). Penelitian di sektor bank syariah masih dominan pada bank syariah nasional berskala besar, dengan temuan bahwa pengungkapan kinerja ekonomi bersifat parsial dan belum konsisten dengan prinsip syariah (Al Hamzah and Apriliasari 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang jelas. Pertama, studi terdahulu lebih banyak membahas bank umum dan bank syariah besar, sementara kajian mengenai BPRS sebagai lembaga keuangan mikro syariah masih belum banyak dilakukan (Chaerani and others 2024) (Mutiha 2023). Kedua, sebagian besar penelitian lain hanya menyoroti aspek tertentu, sehingga belum ada kajian yang menjelaskan penerapan GRI 2 dan GRI 200 secara terpadu pada BPRS (Al Hamzah and Apriliasari 2024). Ketiga, terdapat perbedaan fundamental dalam konteks kelembagaan, bank umum memiliki modal dan infrastruktur besar, sedangkan BPRS justru beroperasi dengan keterbatasan modal, kapasitas teknis, dan sumber daya manusia (Pertiwi, Putri et al. 2024). Perbedaan ini memunculkan pertanyaan penting, apakah BPRS tetap mampu memenuhi standar global pelaporan keberlanjutan meski dengan keterbatasan yang dimilikinya.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan fokus analisis pada Sustainability Report BPRS Arsa Sejahtera menggunakan standar GRI 2021, khususnya *Kinerja Disclosures* (GRI 2) dan Kinerja Ekonomi (GRI 200). Kebaruan penelitian ini terletak pada objek penelitian, karena BPRS belum banyak menjadi fokus kajian GRI dibandingkan bank umum atau bank syariah berskala besar. Sementara penelitian terdahulu cenderung bersifat parsial dan terbatas pada aspek CSR atau indikator *disclosure* dan

ekonomi, penelitian ini secara spesifik menguji kemampuan BPRS dalam memenuhi standar global pelaporan keberlanjutan meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya (Al Hamzah and Apriliasari 2024). Secara teoretis, penelitian ini memperluas literatur pelaporan keberlanjutan pada sektor perbankan syariah mikro, serta secara praktis memberikan rekomendasi bagi BPRS untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian laporan keberlanjutan dengan standar global (Ananda, Pradesa et al. 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan BPRS Arsa Sejahtera dalam mengungkapkan Kinerja *Disclosures* berdasarkan indikator (GRI 2) pada laporan keberlanjutan, khususnya terkait profil organisasi, tata kelola, dan keterlibatan pemangku kepentingan ?
2. Bagaimana pengungkapan kinerja ekonomi BPRS Arsa Sejahtera berdasarkan indikator GRI 200 dalam laporan keberlanjutannya, dan sejauh mana informasi tersebut memberikan gambaran nyata tentang distribusi nilai ekonomi kepada pemangku kepentingan ?

3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat BPRS Arsa Sejahtera dalam menerapkan standar GRI 2 dan GRI 200 pada laporan keberlanjutannya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan ini disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan BPRS Arsa Sejahtera dalam mengungkapkan *General Disclosures* (GRI 2) pada laporan keberlanjutan, khususnya terkait dengan profil organisasi, tata kelola, serta keterlibatan pemangku kepentingan.
2. Untuk mengkaji pengungkapan kinerja ekonomi BPRS Arsa Sejahtera berdasarkan indikator GRI 200, serta menilai sejauh mana informasi tersebut mencerminkan distribusi nilai ekonomi kepada pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat BPRS Arsa Sejahtera dalam menerapkan standar GRI 2 dan GRI 200 pada laporan keberlanjutannya, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan peluang penerapan standar global di lembaga keuangan mikro syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang dapat dijadikan dasar pengembangan di masa mendatang. Adapun manfaat penelitian yang dimaksud adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan mampu memperkaya kajian akademik mengenai implementasi *Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021* pada sektor perbankan syariah. Fokus pada *General Disclosures (GRI 2)* dan Kinerja Ekonomi (GRI 200) memberikan kontribusi konseptual yang penting karena kajian serupa pada lembaga keuangan mikro berskala kecil seperti BPRS masih relatif terbatas. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana indikator-indikator GRI dapat diterapkan pada perbankan syariah berskala kecil. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi menjadi rujukan akademis bagi peneliti selanjutnya yang ingin menelaah praktik pelaporan keberlanjutan di sektor jasa keuangan, baik dari perspektif syariah maupun konvensional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat strategis bagi berbagai pihak. Bagi BPRS Arsa Sejahtera, penelitian ini menjadi alat evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengungkapan

keberlanjutan serta memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar GRI. Bagi regulator seperti OJK, DSN-MUI, dan asosiasi perbankan syariah, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan dan penguatan kebijakan pelaporan keberlanjutan, khususnya bagi bank syariah berskala kecil dan menengah. Sementara itu, bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, penelitian ini membantu memahami kontribusi BPRS dalam menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap praktik perbankan syariah yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.

